



Sejumlah Hotel Butuh Suntikan Modal

- ▶ PHRI DIY sudah mengakomodasi hotel dan restoran tersebut untuk mendapat bantuan pendanaan.
- ▶ Prospek cerah bisnis hotel dan restoran di DIY, terlihat dari okupansi Februari ini.

RATUSAN
HOTEL
DI JOGJA
DIJUAL



Pandemi Covid-19 yang berujung pada pembatasan mobilitas bikin bisnis perhotelan karut marut. Imbas itu masih terasa hingga kini yang memicu munculnya hotel yang dijual di situs *online* dari sejumlah provinsi.



JOGJA—Sejumlah hotel dan restoran kesulitan buka kembali meski kondisi pariwisata di DIY menunjukkan perkembangan yang positif.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

Masalah modal menjadi kendala enam hotel dan empat restoran yang tersebar di Bumi Mataram untuk membuka lagi usahanya setelah dihantam Pandemi Covid-19.

Rating hotel dan restoran tersebut nonbintang dengan kapasitas 60-100 kamar untuk hotel dan 60 tempat duduk

untuk restoran.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY sudah mengakomodasi hotel dan restoran yang kesulitan keuangan untuk mendapat bantuan pendanaan.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menyebut organisasinya sudah mengomunikasikan kebutuhan modal hotel dan restoran tersebut kepada perbankan. "Di Rakernas PHRI kemarin kami juga sudah kerja sama dengan bank BUMN agar dapat memberikan bantuan permodalan, dan permintaan kami disanggupi," katanya, Minggu (26/2).

Sejumlah Hotel...

Hotel dan restoran butuh modal tambahan untuk memperbaiki fasilitasnya. Beberapa hotel dan restoran yang butuh suntikan modal itu sebenarnya hanya membutuhkan dana sekitar Rp100 juta untuk perbaikan fasilitas.

"Sudah kami ingatkan untuk semua hotel dan restoran DIY yang buka lagi setelah pandemi agar memperbaiki fasilitasnya karena ini kunci agar pengunjung tidak kecewa. Jangan sampai buka setelah pandemi tapi fasilitas buruk karena tutup pas pandemi, ini kami tidak inginkan," ujarnya.

Deddy menjelaskan enam hotel dan empat restoran tersebut tersebar merata di kabupaten dan kota DIY. "Mereka mau buka lagi karena prospek sudah semakin cerah," ucap Deddy.

Secara umum, kata Deddy, prospek cerah bisnis hotel dan restoran di DIY, terlihat dari okupansi Februari ini. "Biasanya Februari itu *low seasons*, tetapi ini ternyata seperti *high seasons* tingkat okupansi rata-rata DIY 80 persen," ujar dia.

Deddy menyebut okupansi hotel di Bumi Mataram pada Februari di Gunungkidul saja bisa mencapai 70%, Kulonprogo dan Bantul 65%. Ada pun untuk Sleman dan Kota Jogja mencapai 90%.

"Kalau dibanding Februari tahun lalu jelas sangat meningkat karena Februari 2022 itu hanya 65 persen rata-rata okupansi DIY," katanya.

Pertumbuhan hotel dan restoran, sambung Deddy, juga pesat. Tidak hanya di Sleman dan Jogja, Kulonprogo dan Gunungkidul kini banyak hotel dan restoran baru. "Artinya ini pertumbuhan positif," katanya.

Deddy menyebut – sudah ada 300-an hotel di DIY, baik berbintang maupun nonbintang. "Jumlah kamarnya mungkin sudah tembus angka 7.000 kamar, karena di Gunungkidul dan Kulonprogo terus tambah

hotelnya," ucapnya.

Pandemi Covid-19

Tak hanya di DIY, Pandemi Covid-19 juga berdampak secara nasional pada industri perhotelan. Tercatat ada 2.730 hotel dijual di Indonesia per 31 Januari 2023. Banyak hotel dijual di situs online dengan harga mulai Rp75 juta hingga Rp12 triliun, dengan Bali menjadi provinsi yang terbanyak melego aset utama bisnis tersebut. *(selengkapnya lihat grafis)*

Wakil Ketua Umum Bidang Hotel Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Iswandi Said, mengatakan fenomena ini telah terjadi sejak pandemi Covid-19 pada 2020-2021. "Sebenarnya waktu pandemi juga banyak yang jual, itu waktu pandemi di Bali ada sekitar 80 hotel yang mau dijual, tapi kan enggak semua laku," kata Iswandi.

Menurutnya, ramainya hotel dijual lewat *platform online* menjadi suatu pengorbanan bagi pengelola akibat pembengkakan cicilan dan tidak ada lagi relaksasi yang diberikan perbankan untuk operasional hotel. "Walaupun ada relaksasi tapi setelah selesai pandemi otomatis perbankan mengembalikan kebijakannya ke semula, termasuk membayar kewajiban yang kemarin selama pandemi tertunda," jelasnya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi para pemilik hotel yang terilit kewajiban bayar utang. Di sisi lain, dia pun melihat berakhirnya pandemi tidak serta merta membuat okupansi dan bisnis perhotelan pulih 100%.

Iswandi menuturkan perlu waktu untuk bisnis perhotelan kembali memiliki performa yang positif dan meningkat.

Terkait dengan penjualan hotel, dia pun meragukan minat investor untuk mengoperasikan kembali. "Produknya selama dua tahun enggak ada tamu kan rusak, harus direnovasi, diperbaiki, tapi ya lihatnya *case by case*, mungkin saja ada satu

hotel dijual karena *return*-nya beda dari hotel lain, karena tiap owner punya problem berbeda," ujarnya.

Soal Izin

Sementara itu, buntut kasus pemberian IMB yang menjerat mantan Wali Kota Haryadi menjadi alasan Pemkot Jogja bakal mencabut beberapa izin hotel.

Pemkot menegaskan setidaknya ada empat izin hotel Jogja yang diusulkan untuk dicabut. Hanya saja Pemkot tak merincinya secara detail.

Sejak diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga sekarang pencabutan urung dilakukan. Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi menyebut pencabutan belum dilakukan karena Kemendagri belum menanggapi pengajuan pencabutan izin tersebut. "Sudah kami ajukan sejak September [2022] itu, tetapi sampai sekarang belum dibalas permohonan kami. Saya sendiri sebagai pejabat tak punya kewenangan untuk mencabutnya begitu saja. Perlu izin dari Kemendagri yang menunjuk saya sebagai penjabat pelaksana wali kota," kata Sumadi, Minggu (26/2).

Selain empat izin hotel yang sedang diajukan untuk dicabut, jelas Sumadi, Pemkot Jogja juga menunggu ketetapan hukum perkara Haryadi Suyuti. "Dua IMB jadi barang bukti perkara tersebut, kami juga menunggu ketetapan hukumnya atas perkara tersebut," ujarnya.

Kedua IMB tersebut milik Apartemen Royal Kedathon dan Aston Hotel Malioboro. Dalam sidang tuntutan Haryadi, jaksa penuntut umum (JPU) memohonkan dua IMB tersebut dikembalikan ke Pemkot Jogja.

Sumadi berharap ada kejelasan dari putusan hakim terkait dengan dua IMB tersebut. "Apakah minta dibatalkan, atau seperti apa agar bisa kami tindak lanjuti." *(JIBI/ Bisnis Indonesia)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005